



available online at:

<https://cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/cakrawala>

Vol.14 No.1
Januari
(2020)

Cakrawala

Ekonomi & Keuangan

Published by LPPM-STIE SWADAYA in collaboration
with STIE SWADAYA Jakarta

P-ISSN : 0854-7793
E-ISSN : 2714-643X

Pertumbuhan dan Efektifitas Penerimaan Negara Berupa Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai Terhadap Pendapatan Negara Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2014 Sampai Dengan 2016 dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Yeni Elfiza Abbas ^{1*}, Zulmita^{2*}, Ita Purnamasari^{3*}
^{1*})STIE SWADAYA (Magister Akuntansi)
Jatiwaringin Raya No.36 (Jakarta Timur- 13620)
Email yeni5970@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the growth rate and effectiveness of state revenues in the form of land and building tax revenues and excise tax on state revenues in the finance ministry of the Republic of Indonesia. The method used in this study is descriptive qualitative. The results of this research show that the growth rate of Land and Building Tax revenue has increased every year from 2014 to 2016, it can be seen that the increase in 2014 presentations was 107.97%, in 2015 amounted to 109.59% and in 2016 amounted to 109.79%. The increase in presentation experienced an increase in 2014 with 2015 amounting to 13.69% and the increase in presentation increased in 2015 by 2016 by 3.5%. Increased acceptance of land and building tax is caused by a factor in the shrinking of the revenue plan, the growth of the United Nations oil and gas and the basic data of the provisions have used the application so that it is more accurate. Whereas for the results of the researchers the growth rate of excise tax revenues has decreased every year from 2014 to 2016 can be seen that the increase in 2014 presentations amounted to 100.54%, 2015 amounted to 99.24% and 2016 amounted to 96.90%. The decline in presentation decreased in 2014 with 2015 by 24.09% and the decline in presentation decreased in 2015 by 2016 by 4.24%. The causes of the decline in excise taxes from 2014 to 2016, among others, are influenced by low economic growth and the failure of commodity prices to recover, the effectiveness of annual land and building tax receipts has been very effective while tax revenues have been effective every year. In this case, it is recommended that the government provide regular counseling to further reaffirm the position of the Supreme Audit Board as the only external audit agency of the state finance and its role needs to be further strengthened as an independent and professional institution.

Keywords: Land and Building Tax, Excise Tax



PENDAHULUAN

Penerimaan pajak mengalami perubahan dari Tahun ke Tahun sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang penerimaan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan cukai. Hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Berdasarkan undang – undang No.17 tahun 2003 tentang perbendaharaan negara bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan hibah dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan pembangunan, negara merupakan dana yang tidak sedikit sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil, oleh karena itu negara membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang terdiri dari bumi dan bangunan, air, kekayaan alam, pajak, bea cukai, hasil perusahaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan sumber-sumber lainnya. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah dan hibah. Sumbangan, hadiah dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang member sumbangan, hadiah dan hibah. Berikut tabel Target dan Realisasi penerimaan pajak negara tahun 2014 sampai dengan 2016.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2014 - 2016

Keterangan	Tahun								
	2014			2015			2016		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak bumi dan Bangunan	Rp 23.476,20	Rp 25.735,35	107,97 %	Rp 29.250,05	Rp 27.450,10	109,59 %	Rp 17.710,60	Rp 15.315,25	109,79 %
Pendapatan Cukai	Rp 118.055,50	Rp 125.915,10	100,54 %	Rp 144.641,30	Rp 147.650,25	99,24%	Rp 148.091,20	Rp 146.500,10	96,90%

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari tabel di atas menunjukkan Target Penerimaan Negara dalam Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014 sebesar Rp 23.476,20. Pada tahun 2015 sebesar Rp 29.250,05. Pada Tahun 2016 sebesar Rp 17.710,60. Sedangkan untuk Target Penerimaan Cukai menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 sebesar Rp 118.055,50. Pada Tahun 2015 Rp 125.915,10. Pada Tahun 2016 Rp 148.091,20. Hal tersebut menunjukkan Realisasi Penerimaan Negara dalam Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014 sebesar Rp 25.735,35. Pada tahun 2015 sebesar Rp 27.450,10. Pada Tahun 2016 sebesar Rp 15.315,25. Sedangkan Realisasi Penerimaan Negara dalam Pajak cukai pada tahun 2014 sebesar Rp 125.915,10. Pada tahun 2015 sebesar Rp 147.650,25. Pada Tahun 2016 sebesar Rp 146.500,10. Pendapatan pajak bumi dan bangunan dalam APBN tahun 2016 di targetkan mencapai Rp 17.710,60 miliar, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2015 dan tahun 2014. Dan untuk Pendapatan cukai dalam APBN tahun 2016 di targetkan sebesar Rp 148.091,20 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2015 dan tahun 2014 pendapatan cukai meningkat.

Metode analisis yang digunakan penelitian tersebut diatas adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat bahwa penurunan dengan presentasi terbesar tahun 2014 sebesar 169.12% dan 148.28% dan tahun 2015 indeks presentasi mengalami penurunan sebesar 24.97% dan 24.97% untuk laju pertumbuhan PBB-P2 dan laju pertumbuhan daerah. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadi krisis global yang membuat pertumbuhan ekonomi seluruh dunia mengalami penurunan, tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan sudah sangat efektif setiap tahunnya terbukti dari tahun 2013 kriteria interpretasi PBB-P2 sebesar 153.69%, tahun 2014 sebesar 145.79% dan tahun 2015 sebesar 137.26%, sedangkan kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah sudah memberikan kontribusi yang baik setiap tahunnya. Dalam hal ini disarankan agar pemerintah memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, meningkatnya kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak, dan meningkat pembangunan sarana umum agar masyarakat dapat melihat dan termotivasi untuk membayar pajak. (Skripsi Sulis Setiawati)

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pajak Bumi dan Bangunan dan cukai yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul : “Pertumbuhan dan Efektivitas Penerimaan Negara berupa pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan cukai terhadap pendapatan Negara pada kementerian keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 sampai dengan 2016 “.

Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis

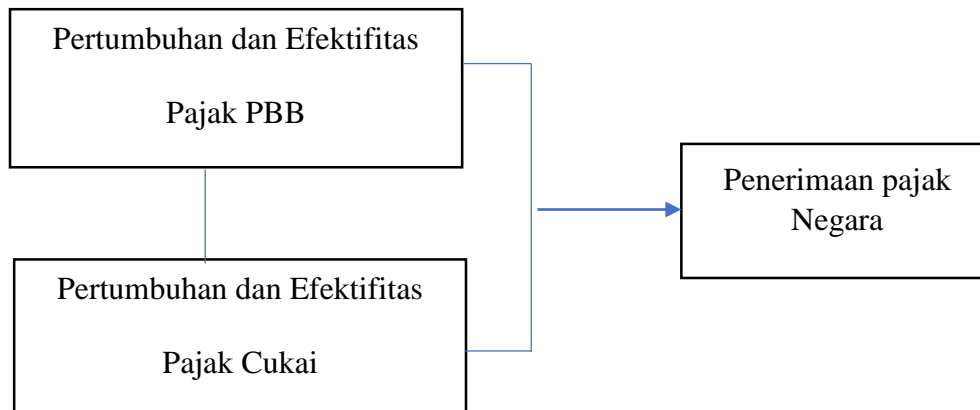
Pengertian pajak menurut beberapa ahli yang dikutip dalam adalah sebagai berikut: Prof. Dr. Rochmad soemitro, S.H. dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Selain itu pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilan tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Selain definisi diatas, S.I. Djajadiningrat: pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timba baik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbaan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pertumbuhan menurut Sadono sukirno (2011:9) Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di diproduksi dalam masyarakat bertambah. Sedangkan Kuznet yang dikutip oleh Todaro (2003:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Kerangka penelitian dan Teoritis



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tulisan / lisan dari orang lain atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran – kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut (Bogdan dan Taylor, 2009:58). Data yang di gunakan yaitu data kualitatif data tersebut di peroleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia yang beralamatkan jalan Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210. Telp. (021) 25549000.

Dengan data penelitian selama 3 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016. Metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Data merupakan sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung (Observasi) dan Survei (Indrianto dan supomo, 2009;249). Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian. Jenis yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian.

Analisis pertumbuhan untuk menghitung table laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan dan cukai terhadap penerimaan pajak dalam negeri tahun 2014 – 2016 di Kementerian keuangan Republik Indonesia. Dengan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- Gx = Tingkat pertumbuhan per-tahun
- Xt = Reaisasi penerimaan per-tahun
- X(t-1) = Realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya.

Analisis Efektifitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelas bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang

direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka pekerjaan itu kurang efektif. Berdasarkan keterangan pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai apakah sudah efektif atau kurang efektif dengan membuat tabel penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai.

$$Efektifitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$$

Untuk menilai Efektif tidaknya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Interpretasi Nilai Efektifitas

Presentase	Kriteria
<60%	Tidak Efektif
61-80%	Kurang Efektif
81-90%	Cukup Efektif
91-100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber : Munir, dkk, 2004:151, di ambil dari jurnal Rudi Saputra

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Anggaran dan Realisasi Penerimaan PBB dan Cukai

Data laporan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dan cukai yang dimuat dalam LHP BPK RI selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada table 3 sebagai berikut :

*Tabel 3
Anggaran penerimaan PBB dan Cukai*

Keterangan	Tahun		
	2014	2015	2016
	Anggaran	Anggaran	Anggaran
Pajak bumi dan Bangunan	Rp 21.742,90	Rp 26.689,88	Rp 17.710,60
Pendapatan Cukai	Rp 117.450,21	Rp 145.641,30	Rp 148.091,20

Sumber : Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2014 sd 2016

Data diatas didapat dari kantor badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan data tersebut sudah diolah. Data diatas dapat dilihat pada table 3, dimana

penerimaan pajak PBB dan cukai mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Data Realisasi Penerimaan pajak PBB dan Cukai Data realisasi penerimaan pajak pada BPK RI dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4
Realisasi Penerimaan Pajak PBB dan Cukai

Keterangan	Tahun		
	2014	2015	2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Pajak bumi dan Bangunan	Rp 23.476,20	Rp 29.450,10	Rp 19.444,91
Pendapatan Cukai	Rp 118.085,93	Rp 144.630,82	Rp 143.507,78

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan data- data yang penulis peroleh dari LHP BPK RI ini berupa analisis laju pertumbuhan dan efektifitas. yaitu:

a. Analisis laju pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan perlu dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan suatu daerah setiap tahunnya. Analisis laju pertumbuhan pendapatan suatu daerah menggambarkan adanya perubahan iklim ekonomi di setiap tahun yang mempengaruhi besar kecilnya laju pertumbuhan penerimaan pendapatan suatu daerah tersebut. Laju pertumbuhan PBB di BPK RI dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan laju pertumbuhan Cukai dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Laju Pertumbuhan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Anggaran Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Pertumbuhan penerimaan (%)
2014	Rp 21.742,90	Rp 23.476,20	107,97%
2015	Rp 26.689,88	Rp 29.450,10	109,59%
2016	Rp 17.710,60	Rp 19.444,91	109,79%

Sumber : Kementerian Keuangan

Tabel 6
Laju Pertumbuhan Penerimaan Cukai

Tahun	Anggaran Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Pertumbuhan penerimaan (%)
2014	Rp 117.450,21	Rp 118.085,93	100,54%

2015	Rp 145.641,30	Rp 144.630,82	99,24%
2016	Rp 148.091,20	Rp 143.507,78	96,90%

Sumber : Kementerian Keuangan

Tabel 7
Realisasi penerimaan perpajakan per jenis penerimaan neto
TA 2014

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam negeri	1.189.826.575.602.000	1.103.215.724.805.241	92,72
Pendapatan PPh	569.863.978.723.427	546.530.217.631.315	95,91
Pendapatan PPhn	475.589.859.975.819	408.829.944.412.636	85,96
Pendapatan PBB	21.742.909.001.000	23.476.281.952.076	107,97
Pendapatan cukai	117.450.217.902.000	118.085.933.022.883	100,54
Pendapatan Pajak lainnya	5.179.609.999.754	6.293.347.786.331	121,50

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan dari tabel 4.5 data yang sudah di kelola di atas dapat diketahui laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak PBB di BPK RI dalam 3 tahun dari periode 2014 sampai dengan 2016. Laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak PBB tahun 2014 Mengalami peningkatan. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target sebagai berikut :

- Penyusunan rencana penerimaan TA 2014 hanya berdasarkan data pokok ketetapan 2014.
- Pertumbuhan PBB migas lebih akurat dengan menggunakan PER-45/P/J/2013, sehingga perhitungan bangunab, terutama sumur, menghasilkan ketetapan yang realistis.
- Data pokok ketetapan 2014 sudah menggunakan aplikasi (non manual) sehingga lebih akurat.

Berdasarkan dari tabel 7 data yang sudah di kelola di atas dapat diketahui laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak cukai dalam 3 tahun dari periode 2014 sampai dengan 2016 di BPK RI. Pada tahun 2014 pendapatan pajak cukai mengalami kenaikan dikarenakan oleh:

- Meningkatnya volume produksi hasil tembakau.
 - Tahun 2014 terjadi kenaikan tarif cukai MMEA (Minuman mengandung Etil Alkohol), dengan kenaikan rata- rata sebesar 11,62% (produksi Dalam Negeri) dan 11,70% (impor)
- Pada tahun 2015 penerimaan Cukai mengalami peningkatan 24,09%, dari tahun 2014,

TABEL 8
Realisasi Penerimaan Pajak s.d. 31 Desember 2015
Kinerja beberapa jenis pajak pada tahun 2015

No	Jenis pajak	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target A% 2014-2015	Realisasi s.d. 31 Desember 2015	Realisasi s.d. 31 Desember 2015

					4014	2015	A% 2013- 2014	A% 2014- 2015	%penc apaian 2014	%penc apaian 2015
A	PPh Non Migas	458,735.21 105,650.67	629,838.35 126,848.27	37.30	458,735.21 105,650.67	552,313.84 113,853.42	9.83 17.18	20.40 7.76	94.39 99.98	87.69 89.76
	1. PPh Ps 21	7,256.21 39,453.96	9,646.44 57,123.73	20.06	7,256.21 39,453.96	8,418.13 40,334.92	6.13 8.59	16.01 2.23	91.23 92.38	87.27 70.61
	2. PPh Ps 22	25,517.23 4,704.50	33,478.95 5,215.08	32.94	25,517.23 4,704.50	27,741.65 8,248.21	14.90 7.33	8.72 75.33	98.04 91.40	82.86 158.16
	3. PPh Ps 22 Impor	149,299.78 39,446.48	220,873.59 49,778.95	44.79	149,299.78 39,446.48	184,600.91 49,396.99	(3,72) 26.84	23.64 25.23	82.18 119.98	83.58 99.23
	4. PPh Ps 23	126,804.50	126,804.50	31.20	126,804.50 88.84	119,556.87 162.64	22.00 135.22	36.92 83.07	104.10 204.62	94.28 247.04
	5. PPh Ps 25/29 OP	88.84	65.84	10.85						
	6. PPh Ps 25/29 Badan			47.94						
	7. PPh Ps 26			26.19						
	8. PPh Final	409,181.63 241,145.82	576,469.17 338,192.39	45.22	409,181.63 241,145.82	423,945.27 279,819.98	6.36 6.34	3.61 16.04	86.04 87.77	73.54 82.74
	9. PPh Non Migas Lainnya	152,303.94 10,241.38 5,335.61 154.87	207,509.79 19,348.56 10,751.94 666.49	(25,89)	152,303.94 10,241.38 5,335.61 154.87	130,601.77 9,258.35 3,988.53 276.65	9.58 (11,31) (26,72) 16.21	(14,25) (9,60) (25,25) 78.63	86.20 67.64 63.52 25.77	62.94 47.85 37.10 41.51
	PPN dan PPnBM									
B	1.PPN Dalam Negri			40.88 40.24						
	2.PPN Impor	23,476.23	26,689.88	36.25 88.93	23,476.23	29,252.87	(7,23)	24.61	107.97	109.60
	3.PPnBM Dalam Negri	6,293.36	11,729.49	101.51 330.34	6,293.36	5,604.56	27.47	(10,94)	121.50	47.78
	4. PPnBM Impor									
	5.PPN/PPnBM									
	Lainnya			13.69						
	PBB			86.38						
C	Pajak Lainnya									
D										
	Total Non ppn Migas	897,686.42	1,244,723.88	38.66	897,686.42	1,011,116.53	7.81	12.64	90.81	81.23
E	Ppn Migas	87,445.66	49,534.79	(43,35)	87,445.66	50,145.55	(1,47)	(42,66)	104.24	101.23
	Total termasuk ppn migsas	985,132.09	1,294,258.67	31.38	985,132.09	1,061,262.08	6.92	7.73	91.86	82.00

Sumber : *Kementerian Keuangan*

Berdasarkan dari data tabel 4.6 yang sudah di kelola di atas dapat diketahui laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak PBB di BPK RI tahun 2015 laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak PBB Mengalami peningkat Factor yang mempengaruhi tercapainya target 2015 :

- a) penyusunan rencana penerimaan TA 2015 hanya berdasarkan data pokok ketetapan 2015. Kinerja beberapa jenis pajak pada tahun 2015
 - b) Pertumbuhan PBB migas lebih akurat dengan menggunakan PER-45/P/J/2013, sehingga perhitungan bangunab, terutama sumur, menghasilkan ketetapan yang realistis.
 - c) Data pokok ketetapan 2015 sudah menggunakan aplikasi (non manual) sehingga lebih akurat.
- Ini menunjukkan perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2015, namun masih terdapat beberapa jenis pajak yang menunjukkan prestasi yang lebih baik dibandingkan tahun 2014. Untuk anggaran di tahun 2015 mengalami peningkatan sehingga dari sisi pencapaian penerimaan mengalami penurunan sebesar 99,24% , begitu juga realisasi pendapatan mengalami penurunan sebesar 96,90% .

Tabel 9
Rincian realisasi penerimaan Negara tahun 2015

Penerimaan Perpajakan (triliun rupiah)	2014			2015		
	APBN	LKPP audited	%thd APBN	APBN	Reaisasi sementara	%thd APBN
1. PPh Migas	83.9	87.4	104.2	49.5	49.7	100.3
2. Pajak Non-Migas						
a. PPh Non-Migas	998.5	897.7	90.8	1,244.7 629.8	1,011.1 552.6	81.2 87.7 73.5
486.0	458.7	94.4	576.5 26.7 11.7	423.7 29.3 5.6	109.6 47.5 92.1	
b. Pajak pertambahan nilai	475.6	409.2	86.0	195.0 145.7 37.2	179.6 144.6 31.2	99.2 83.9 30.9
21.7	23.5	108.0			3.7	
c. Pajak bumi dan bangunan			121.5	12.1		
5.2	6.3	93.1				
d. Pajak Lainnya	173.7		100.5			
117.5	161.7	90.6				
3. Bea dan Cukai	35.7	118.1	55.0			
a. Cukai	20.6	32.3				
11.3						
b. Bea Masuk						
c. Bea Keluar						
TOTAL	1,246.1	1,146.9	92.0	1,489.3	1,240.4	83.3

Sumber : Kementerian Keuangan

Laju pertumbuhan penerimaan cukai tahun 2015 sebesar Rp 180,26 triliun atau sebesar 92,44% dari target APBN (Rp 194,99 triliun). Disamping penerimaan dari bea masuk, bea keluar dan cukai sebesar Rp 180,26 triliun, juga dilakukan pungutan Negara atas pajak dalam rangka import (PDRI) dan PPN hasil tembakau (PPN HT) sebesar 194,63 triliun (tidak termasuk pajak rokok sebesar Rp 13,9 triliun). Dengan demikian total penerimaan yang di pungut adalah Rp 388,79 triliun atau 31,46% dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1,235,8 triliun. Kontribusi terbesar penerimaan cukai dari hasil tembakau sebesar 96,49%, kemudian cukai MMEA sebesar 3,15%, cukai Ethil Alkohol sebesar 0,10% dan pendapatan cukai lainnya sebesar 0,26% . .

Sehubungan telah di tetapkan undang – undang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2015,,target penerimaan Negara yang di bebaskan kepada

direktorat jendral Bea dan Cukai mengalami kenaikan sebesar Rp 21.266 Triliun atau 12.24% dari APBN-P 2014.

Tabel 10
Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 dan 2016

No	Penerimaan perpajakan (triliun rupiah)	2015			2016		
		APBN- P	LKPP Audited	% thd APBN- P	APBN- P	Realisasi sementara	% thd APBN- P
1.	PPh migas	49.5	49.7	100.3	36.3	35.9	98.8
2.	Pajak Non-migas	1.244.7	1.011.2	81.2	1.318.9	1.069.0	81.1
	a.PPh Non-migas	629.8	552.6	87.7	819.5	630.9	77.0
	b.Pajak Pertambahan Nilai	576.5	423.7	73.5	474.2	410.5	86.6
	c.Pajak Bumi dan Bangunan	26.7	29.3	109.6	17.7	19.4	109.8
	d.Pajak lainnya	11.7	5.6	47.5	7.4	8.2	110.1
3.	Bea dan Cukai	195.0	179.6	92.1	184.0	178.7	97.2
	a.Cukai	145.7	144.6	99.2	148.1	143.5	96.9
	b.Bea Masuk	37.2	31.2	83.9	33.4	32.2	96.5
	c.Bea Keluar	12.1	3.7	30.9	2.5	3.0	119.9
	Total	1.489.3	1.240.4	83.3	1.539.2	1.283.6	83.4

Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 lebih rendah dibandingkan target dalam APBN-P 2016, antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dibandingkan dengan asumsi APBN-P tahun 2016, serta belum pulihnya harga komoditas. Penerimaan perpajakan tahun 2016 meningkat 3,5 persen dibandingkan tahun 2015 terutama didorong oleh penerimaan PPh nonmigas yang meningkat sekitar 14,2 persen. Peningkatan PPh nonmigas tersebut tidak lepas dari keberhasilan program tax amnesty.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105,81 triliun atau 81.60% dari target tahun APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,20 triliun. Kinerja capaian penerimaan pajak tahun 2016 ini sedikit lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 81,96%, namun realisasi ini masih tumbuh positif dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,81% (total pajak non PPh Migas) atau 4,24% (total pajak termasuk PPh Migas).

Meskipun persentase penerimaan pajak dari target selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, namun penerimaan pajak (termasuk PPh Migas) tahun 2014-2015 tumbuh positif sebesar 7,68%, dan tahun 2015-2016 tumbuh positif sebesar 4,24%.

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang datanya diperoleh dari Modul Penerimaan Online (MPO) yang di dalamnya sudah mencakup

sanksi, denda administrasi serta pungutan lainnya. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN atau APBN-P. Realisasi penerimaan bea dan cukai s.d 31 Desember 2016 mencapai Rp. 178,7 Triliun atau sebesar 97,15% dari target APBN-P (Rp. 183,9 Trilliun). Selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata peningkatan realisasi DJBC sebesar 8,32% setiap tahun. Hasil penelitian ini dimana laju pertumbuhan penerimaan pajak PBB di BPK RI mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menunjukkan bahwa keadaan penerimaan pajak mengalami perkembangan.

b. Analisis Efektifitas

Besarnya tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dan cukai dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Efektifitas atau hasil dapat mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan suatu wajib pajak membayar pajak masing – masing, dan membayar seluruh pajak terhutang masing – masing, dan pengukur efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dan cukai menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Pengukuran efektifitas PBB

$$\text{efektifitas tahun 2014} = \frac{Rp\ 23.476,20}{Rp\ 21.742,90} \times 100\% = 107,97\%$$

$$\text{efektifitas tahun 2015} = \frac{Rp\ 29.450,10}{Rp\ 26.689,88} \times 100\% = 109,59\%$$

$$\text{efektifitas tahun 2016} = \frac{Rp\ 19.444,91}{Rp\ 17.710,60} \times 100\% = 109,79\%$$

Dari hasil data di atas. Kita dapat melihat peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dimana sangat efektifitas dengan adanya peningkatan setiap tahunnya.

2. Pengukuran efektifitas cukai

$$\text{efektifitas tahun 2014} = \frac{Rp\ 118.085,93}{Rp\ 117.450,21} \times 100\% = 100,54\%$$

$$\text{efektifitas tahun 2015} = \frac{Rp\ 144.630,82}{Rp\ 145.641,30} \times 100\% = 99,24\%$$

$$\text{efektifitas tahun 2016} = \frac{Rp\ 143.507,78}{Rp\ 148.091,20} \times 100\% = 96,90\%$$

Sedangkan peningkatan penerimaan cukai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dimana kurang efektifitas dengan adanya penurunan setiap tahunnya. Dari pengelola data tersebut dapat diketahui tingkat efektifitas dari setiap tahunnya, berikut ini adalah tabel 5 yang mengukur tingkat efektifitas di uraikan sebagai berikut.

Tabel 11
Efektifitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan kantor BPK RI
Tahun 2014 sampai dengan 2016

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)	Tingkat efektifitas
1	2014	Rp 21.724,90	Rp 23.476,20	107,97 %	Sangat efektif
2	2015	Rp 26.689,88	Rp 29.450,10	109,59 %	Sangat efektif
3	2016	Rp 17.710,60	Rp 19.444,91	109,79 %	Sangat efektif

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di BPK RI tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuatif. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu saat Kinerja APBN-P 2016 menghadapi tantangan yang cukup berat terutama akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta melemahnya harga komoditas. Meskipun dibayangi ketidakpastian perekonomian global, Pemerintah telah berhasil menjaga APBN 2016 terkendali dalam batas aman. Keberhasilan ini merupakan komitmen Pemerintah untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal melalui fiscal rule-nya (UU) No.17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara) serta reformasi ekonomi yang dilakukan secara komprehensif. Adapun reformasi ekonomi tersebut terdiri dari reformasi struktural yang ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi dan menjaga daya beli masyarakat, reformasi anggaran untuk menciptakan kebijakan fiskal dan APBN yang kredibel, serta kebijakan moneter yang akomodatif dan menjaga stabilitas, besarna tingkat efektifitas tahun 2016 yaitu 109.79% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Pada tahun 2015 dan 2014 merupakan tingkat efektifitas sangat efektif pula dari pencapaian realisasi yang di dapat oleh APBN.

Tabel 12
Efektifitas penerimaan Cukai kantor BPK RI
Tahun 2014 sampai dengan 2016

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)	Tingkat efektifitas
1	2014	Rp 117.450,21	Rp 118.085,93	100.54%	Sangat efektif
2	2015	Rp 145.641,30	Rp 144.630,82	99.24%	Efektif
3	2016	Rp 148.091,20	Rp 143.507,78	96.90%	Efektif

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan Cukai di BPK RI tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 persentasenya mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2016 sebesar 96.90%, walaupun mengalami tekanan pada sisi pendapatan namun Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga agar program- program prioritas tetap terlaksana secara optimal dan realisasi dapat tercapai sesuai anggaran yang telah di tetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran

Setelah penulis membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan maka dalam penutup ini diuraikan kesimpulan dan saran.

1. Hasil Peneliti ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat bahwa peningkatan presentasi 2014 sebesar 107,97% ,tahun 2015 sebesar 109,59% dan tahun 2016 sebesar 109,79%. Peningkatan presentasi mengalami peningkatan tahun 2014 dengan tahun 2015 sebesar 13,69% dan Peningkatan presentasi mengalami peningkatan tahun 2015 dengan tahun 2016 sebesar 3,5%. Peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di sebabkan oleh factor adanya penyusutan rencana penerimaan, pertumbuhan PBB migas dan data pokok ketetapan sudah menggunakan aplikasi sehingga lebih akurat.
2. Hasil peneliti tingkat pertumbuhan penerimaan pajak cukai mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat bahwa peningkatan presentasi 2014 sebesar 100,54% ,tahun 2015 sebesar 99,24% dan tahun 2016 sebesar 96,90%. Penurunan presentasi mengalami penurunan tahun 2014 dengan tahun 2015 sebesar 24,09% dan Penurunan presentasi mengalami penurunan tahun 2015 dengan tahun 2016 sebesar 4,24%. Penyebab penurunan pajak cukai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, antara lain dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi serta belum pulihnya harga komoditas
3. Dari hasil Peneliti Efektifitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan kantor BPK RI Tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan hasil persentase rata – rata 100% yang menunjukkan bahwa sangat efektif
4. Dari hasil Peneliti Efektifitas penerimaan Cukai kantor BPK RI Tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan hasil persentase rata – rata 90% yang menunjukkan bahwa efektif, Efektifitas mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan suatu wajib pajak membayar pajak masing – masing, dan membayar seluruh pajak terhutang masing – masing, dan pengukur efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian I. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Erlangga.
Bohari H. 2016. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Rajawali Pers.
Diana dan Setiaweati, 2012. Perpajakan Indonesia Yogyakarta : Andi
Eko LJ. 2017. Undang – Undang Pajak Lengkap. Jakarta : Mira Wacana Media.
Ismatulah D. 2011. Akuntansi Pemerintahan. Bandung : CV Pustaka Setia.
Mardiasmo. 2009. Akunansi Sekor Publik. Yogyakarta : Andi.
Pohan, Chairil Anwar.2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Purwono, Herry.2010. Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta : Erlangga.
Resmi S. 2017. Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
Susyanti J, Ahmad Dahlan. 2016. Perpajakan. Malang : Empatdua Media